

TA'LIMUNA. Vol.4, No. 1, Maret 2015-ISSN 2085-2975

**MADRASAH: ANTARA TRADISI DAN TUNTUTAN PERUBAHAN**

Zaedun Na'im

STAI Ma'had Aly Al Hikam Malang

zaidun\_naim@yahoo.com

**Abstrak**

The situation of progress of development in various sectors of life, urged the madrasa to improve the quality of education are developed. The programs intelligently based on contemporary needs, demands to be realized, so that the existence of madrassas can be functional in answering daily reality, both in the context of developing science and technology, create jobs or in an attempt to foster a critical attitude, dynamic and be autonomous Madrasah need to be developed to meet three demands minimal in improving the quality of madrasah, namely: (1) how to make the madrassa as a vehicle for fostering the spirit or practice of Islamic life, (2) how to strengthen the presence of the madrassa so equally with the school system, (3) how the madrassa able to respond to future demands science and technology in order to anticipate future developments and globalisasi Madrasah era in the context of preparing learners face of changing global age, it becomes important role. Madrasah success in preparing students to face future challenges more complex will produce graduates with a competitive advantage and became the leader of the nation's leaders that will determine the direction of the development of this nation

**Keywords;** Madrasah, tradisi, tuntutan perubahan

**Pendahuluan**

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang biasanya dibangun disamping masjid dan pesantren. Madrasah pernah berkembang pada abad 11 dan 12, atau periode pertengahan sejarah Islam khususnya di wilayah Bagdad seperti madrasah Nizamiyah. Madrasah

Zaedun Na'im | 73

berkembang di Indonesia merupakan fenomena modern pada awal abad 20. Zaenuddin labai dapat disebut sebagai tokoh pertama yang pada tanggal 10 oktober 1915 mendirikan lembaga pendidikan madrasah di padang panjang, sebelum lembaga serupa berkembang di berbagai daerah. Madrasah di Indoneisa bukan merupakan kelanjutan atau adopsi langsung dari madrasah abad pertengahan<sup>1</sup>

Sebagai sebuah institusi pendidikan, madrasah merupakan bagian dari proses penentu nasib bangsa di masa depan. Oleh karena pendidikan adalah aset untuk mencapai cita-cita di masa mendatang, maka madrasah pun harus memperoleh posisi yang strategis dalam kehidupan anak bangsa. Madrasah yang dimaksud untuk saat ini adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh departemen Agama<sup>2</sup>

Berkenaan kemajuan pembangunan di berbagai sektor kehidupan menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Sifat selektif masyarakat terhadap lulusan pendidikan makin ketat. Hal ini diikuti dengan perubahan sikap masyarakat yang semakin selektif pula dalam memilih lembaga pendidikan.

Bagi madrasah dalam situasi ini tak memberi pilihan lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dikembangkannya. Madrasah dituntut menawarkan program-programnya secara cerdas berdasarkan kebutuhan kekinian, sehingga keberadaan madrasah secara fungsional mampu menjawab realitas keseharian, baik dalam konteks mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan lapangan kerja atau dalam upaya membina sikap hidup yang kritis, dinamis dan mandiri

Agak disesalkan, sistem pendidikan madrasah terbelit aktivitas rutin yang kurang cermat, ditandai dengan praktek pendidikan formal yang kurang menumbuhkan kreativitas dan tanggungjawab, bahkan cenderung menanamkan sifat ketergantungan. Kemandirian, kepekaan dan kepedulian sosial peserta didik kurang digali. Akibatnya proses pendidikan madrasah gagal untuk melahirkan lulusan yang kreatif, bermutu dan berdaya saing. Padahal mereka pun tak semuanya memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 7.

<sup>2</sup> Khozin, *et.al. Manajemen Pemberdayaan Madrasah* (Malang: UMM press, 2006), 25.

<sup>3</sup> DEPAG. *Desain Pengembangan Madrasah* (Jakarta: Direktorat jenderal kelembagaan Agama Islam, 2005), iii.

Tulisan ini bermaksud mengajak kita, agar mencermati kondisi dan persoalan yang dihadapi madrasah, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang mampu mewujudkan *effective school or good school* (sekolah yang efektif atau sekolah yang baik), sehingga suatu ketika madrasah akan menjadi pilihan utama.

### Sejarah Lahir dan Berkembangnya Madrasah

Sejauh ini tampaknya belum ada data yang pasti kapan istilah *madrasah*, yang mempunyai pengertian sebagai lembaga pendidikan, mulai digunakan di Indonesia. Para peneliti sejarah pendidikan Islam pun pada umumnya lebih tertarik membicarakan sistem pendidikan atau pengajaran tradisional Islam yang digunakan baik di masjid, surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), dan lain-lain, daripada membicarakan *madrasah*.

Dalam beberapa hal, penyebutan istilah *madrasah* di Indonesia juga seringkali menimbulkan konotasi "ketidakaslian", dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di masjid, dayah (Aceh), surau (Minangkabau), atau pesantren (Jawa), yang dianggap asli Indonesia. Berkembangnya *madrasah* di Indonesia di awal abad ke-20M, memang merupakan wujud dari upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan para cendekiawan Muslim Indonesia, yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam "asli" (tradisional) tersebut dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di samping itu, kedekatan sistem belajar-mengajar ala *madrasah* dengan sistem belajar-mengajar ala sekolah yang ketika *madrasah* mulai bermunculan, memang sudah banyak dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga banyak orang berpandangan bahwa *madrasah* sebenarnya merupakan bentuk lain dari sekolah, hanya saja diberi muatan dan corak keislaman<sup>4</sup>

Pandangan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, baik pada gelombang *pertama* (abad ke-7 M) maupun gelombang ke-2 (abad ke-13)<sup>5</sup> tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya

---

<sup>4</sup> Penjelasan lebih jauh mengenai ini, lihat, Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999), 81

<sup>5</sup> Tentang masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi memang masih menjadi bahan perdebatan, tetapi data mengenai itu bukannya tidak ada, salah satunya adalah yang ditulis oleh Groeneveldt dalam *Historical Notes on Indonesia and Malaya* (Bhratara, 1960). Namun para peneliti sejarah tampaknya sepakat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 M, dari temuan filologi berupa batu nisan Sultan Malik al-Salih, 1297, yang dianggap sebagai bukti akan adanya suatu kerajaan bercorak Islam di Sumatera. Mengenai ini lihat, Harjati Soebadio, "Agama sebagai Sasaran Penelitian Filologi", dalam Parsudi Suparlan

*madrasah*. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah pesantren. Dengan alasan itu pula pesantren secara historis seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*).<sup>6</sup> Karena itu membicarakan *madrasah* di Indonesia dalam kaitannya dengan sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren sebagai cikalbalknya. Dengan kata lain, *madrasah* merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu menjadi penting untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya *madrasah* di kemudian hari.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, setidaknya karena beberapa alasan: a) sebagai manifestasi pembaruan sistem pendidikan Islam, b) penyempurnaan sistem pesantren, c) keinginan sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan barat, dan d) sebagai sintesa sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat.<sup>7</sup>

Sedangkan pendapat lain seperti dikemukakan oleh Maksum, bahwa kelahiran madrasah di Indonesia disebabkan dua faktor<sup>8</sup>. Dua faktor yang dimaksud adalah *pertama*, karena pembaharuan Islam, kemunculan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam, yang dimotori sejumlah intelektual Islam dan organisasi keagamaan Islam. Agaknya kaum intelektual dan aktivis gerakan Islam memandang, bahwa pendidikan adalah medan yang sangat strategis dalam membentuk pandangan keislaman masyarakat. Bahkan pendidikan dapat dijadikan sebagai instrument pengelakan ideology keagamaan, seperti yang dianut para aktivis organisasi keagamaan. *Kedua*, sebagai respon terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Madrasah dalam beberapa hal dapat dikatakan sebagai lembaga persekolahan ala belanda yang diberi muatan keagamaan. Sistem pendidikan yang diperkenalkan pemerintah kolonial, adalah sebagai jawaban terhadap kenyataan sistem pendidikan pribumi yang tidak layak

---

(peny.), *Pengetahuan Budaya, Ilmuilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 198 1/1982), 32.

<sup>6</sup> Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Parama-dina, 1997), 3.

<sup>7</sup> Muhaimin dan Abdul mujib, *Pemikiran pendidikan islam, kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalnya* (Bandung: Trigenda karya, 1993), 305.

<sup>8</sup> Maksum, *Madrasah:Sejarah dan Perkembangannya..*, 82-89

untuk diperbaharui, karena kebiasaan-kebiasaan yang cukup jelek, baik dari segi kelembagaan, kurikulum maupun metode pengajarannya.

Menelusuri sejarah pertumbuhan madrasah, banyak dijumpai aspek-aspek historis yang menarik. Seperti apa yang telah disinggung diatas, bahwa Zaman Belanda, pendidikan Islam berada dalam fase awal, yaitu melakukan eksperimen materi dan metodologi pembelajarannya. Sedangkan pada zaman jepang, pendidikan agama Islam ditangani secara khusus. Pemerintah Jepang membuat *relasi-positif* dengan kiai dan ustadz, yang kemudian membuat kantor urusan agama (*shumubu*). Setelah tahun 1945-tepatnya tanggal 3 Januari 1946 - kantor tersebut menjadi kementrian agama. Dalam tahun-tahun pertama, kementrian agama membuat divisi khusus yang menangani pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren).

Terminologi “ modernisasi madrasah” tampaknya mulai menguat saat orde baru melancarkan manuver-menuver politik pendidikannya. Baik melalui jalan strukturisasi-yaitu penjenjangan madrasah dengan mengacu pada aturan departemen pendidikan nasional termasuk desain kurikulumnya<sup>9</sup>

Setelah kekuasaan orde baru berjalan satu periode, pada tahun 1975, dikeluarkan SKB tiga menteri yang mencoba meregulasi madrasah secara *integral-komprehensif*. Inilah era baru madrasah yang ditandai dengan efektifnya pembenahan madrasah di tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, sebagai “sekolah umum plus pendidikan agama” (kurikulum,70%:30%), menjadikan madrasah terbebani dalam mengejar kualitas sekolah pada umumnya. Selama lima pelita berikutnya, kualitas madrasah bisa dipukul rata menghasilkan lulusan yang lemah *basic competence* agamanya, demikian juga lemah penguasaan ilmu umumnya.

Dengan demikian, sampai reformasi politik meletus tahun 1988, dan terjadi transisi pemerintahan dengan berganti-gantinya kepala Negara, dunia pendidikan bukan tidak terkena dampaknya. Spectrum reformasi politik tersebut memancar ke mana-mana, termasuk wilayah pendidikan keagamaan. Madrasah justru mulai memikirkan posisinya, nilai kehadirannya (*bargaining position*) dan menyadari hak-haknya, yang selama orde baru nasibnya dimarjinalkan secara tidak adil (diskriminatif). Prestasi penting era reformasi adalah disahkannya UU Sisdiknas no.20 tahun 2003, yang menempatkan madrasah *ekuivalen* dengan sekolah umum termasuk dalam perlakuan anggarannya<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> DEPAG, *Desain..*, 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 7.

Salah satu ciri penting dari madrasah-madrasah periode pertumbuhan adalah bahwa eksistensinya antara satu sama lain masih terpisah-pisah. Usaha mendirikan madrasah masih bersifat pribadi atau organisasi dalam pengertian sempit. Madrasah-madrasah di padang tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan madrasah-madrasah di Jawa. Tidak ada pengaturan yang bersifat umum dan mengikat mengenai bentuk kelembagaan, struktur manajemen, dan kurikulumnya. Seperti diisyaratkan oleh Steenbrink, usaha pendirian madrasah itu bertolak dari motif-motif masing-masing, namun semuanya mengarah pada peningkatan peran umat Islam. Dengan demikian uniformitas pada madrasah-madrasah itu hanya dapat dilihat dalam sistem pendidikannya yang berkelas dan isi pendidikannya memberi perhatian pada ilmu-ilmu agama saja.<sup>11</sup>

Di antaram ulama yang berjasa dalam perkembangan madrasah di Indonesia antara lain: Syaikh Amrullah Ahmad (1907) di Padang, KH. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, KH Wahab Hasullah bersama KH. Mas Mansyur (1914) di Surabaya. Rangkeyo Rahmah al-Yunusi (1915) di Padang Panjang, KH. Hasyim Asyari (1919) mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang.

Organisasi-organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan banyak mendirikan madrasah dan juga sekolah-sekolah umum dengan nama, jenis dan tingkatan yang bermacam-macam, antara lain:

1. Muhammadiyah (1912) mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin/Muallimat, Muballigin/Muballighat dan Madrasah Diniyah
2. Al-Irsyad (1913), mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassis.
3. Matlul Anwar di Menes Banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah
4. Perhimpunan Umat Islam (PUI) (1977) mendirikan Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Pertanian.
5. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) (1928) mendirikan madrasah dengan berbagai nama, diantaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, Kuliyah Syariah
6. Nahdlatul Ulama (1926) mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*., 99.

<sup>12</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan pendidikan anak bangsa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)., 20.

Dengan demikian sejarah lahirnya madrasah bisa diartikan tindak lanjut dari model pendidikan pesantren yang sudah ada sebelumnya dan berkembangnya madrasah tidak lepas dari suatu gerakan pembaharuan pada pendidikan Islam itu sendiri.

### Karakteristik Madrasah

Ciri khas madrasah lebih dari hanya sekedar penyajian mata pelajaran agama. Artinya, ciri khas tersebut bukan hanya sekedar menyajikan mata pelajaran agama Islam di dalam lembaga madrasah tetapi yang lebih penting ialah perwujudan dari nilai-nilai keislaman di dalam totalitas kehidupan madrasah. Suasana lembaga madrasah yang melahirkan ciri khas tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) Perwujudan nilai-nilai keislaman di dalam keseluruhan kehidupan lembaga madrasah; (2) Kedidupan moral yang beraktualisasi, dan (3) Manajemen yang profesional, terbuka, dan berperan aktif dalam masyarakat<sup>13</sup>

Secara harfiah *madrasah* bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis *keduanya* memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar secara formal. Namun demikian Karel Steenbrink membedakan *madrasah* dan sekolah karena *keduanya* mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda.<sup>14</sup> *Madrasah* memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Meskipun mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah, *madrasah* memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.

Perbedaan karakter antara *madrasah* dengan sekolah itu dipengaruhi oleh perbedaan tujuan antara keduanya secara historis. Tujuan dari pendirian *madrasah* ketika untuk pertama kalinya diadopsi di Indonesia ialah untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan,<sup>15</sup> sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi

---

<sup>13</sup> Tilaar, *Pradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), 179.

<sup>14</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986).

<sup>15</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 192-193.

kolonialisme dan Kristen,<sup>16</sup> di samping untuk mencegah memudarnya semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda

Sekolah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada sekitar dasawarsa 1870-an bertujuan untuk menyiapkan calon pegawai pemerintah kolonial,<sup>17</sup> dengan maksud untuk melestarikan penjajahan.<sup>18</sup> Dalam lembaga pendidikan yang didirikan Kolonial Belanda tidak diberikan pelajaran agama sama sekali. Karena itu tidak heran jika di kalangan kaum pribumi, khususnya di Jawa, ketika itu muncul resistensi yang kuat terhadap sekolah, yang mereka pandang sebagai bagian integral dari rencana pemerintah kolonial Belanda untuk "membelandakan" anak-anak mereka.<sup>19</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan Pesantren memiliki tujuan yang lain lagi. Menurut Mahmud Junus, Djumhur, dan Steenbrink, pesantren didirikan untuk menjadi basis perjuangan rakyat dalam melawan penjajah.<sup>20</sup> Pesantren merupakan upaya kalangan pribumi untuk mengembangkan sistem pendidikan sendiri yang sesuai dengan tuntunan agama dan kebudayaan daerah untuk melindungi diri dari pengaruh sistem pendidikan kolonial (Belanda) saat itu, melalui "politik balas budi", atau yang lebih dikenal dengan sebutan "politik etis".

Namun, meskipun pesantren berperan lebih dahulu dalam membendung pengaruh pendidikan kolonial, dibandingkan dengan *madrasah*, para pembaharu pendidikan Islam di Indonesia tampaknya mengakui bahwa dalam banyak hal, lembaga pendidikan Islam tradisional ini mengandung banyak kelemahan, sementara pada sisi lain lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda harus diakui memiliki banyak kelebihan. *Madrasah* yang, seperti kebanyakan lembaga modern lainnya, masuk pada sistem pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20, ini dimaksudkan sebagai upaya menggabungkan hal-hal yang positif dari pendidikan pesantren dan sekolah belanda. Lembaga pendidikan *madrasah*

---

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, "*Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan* ", Kata Pengantar untuk buku Nurcholish Madjid., xiv.

<sup>17</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 47.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>19</sup> Azyumardi Azra, *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan*., xii.

<sup>20</sup> Untuk lebih jelas mengenai uraian mereka, lihat beberapa aspek pemikiran mereka tentang Pendidikan Islam dalam beberapa bukunya antara lain, Karel A. Steenbrink, *Pesantren.*; Jumhur, *Sejarah Pendidikan Indonesia*; dan Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*.



ini secara berangsur-angsur diterima sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang juga berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.<sup>21</sup>

Telah disinggung bahwa *madrasah* berbeda pengertiannya antara masa klasik Islam dengan masa ketika lembaga pendidikan tersebut masuk ke Indonesia pada sekitar awal abad ke-20. *Madrasah* di Indonesia merujuk pada pendidikan dasar sampai menengah, sementara pada masa klasik Islam *madrasah* merujuk pada lembaga pendidikan tinggi (*the institution of higher learning*).<sup>22</sup> Perbedaan tersebut pada gilirannya bukan hanya merupakan masalah perbedaan definisi, tapi juga menunjukkan perbedaan karakteristik antara *keduanya*. Merujuk pada penjelasan Nakosteen,<sup>23</sup> motif pendirian *madrasah* pada masa klasik Islam ialah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan umum (sekuler), yang dianggap kurang memadai jika dilakukan di dalam masjid, sebab masjid merupakan tempat ibadah.

Namun, upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan umum itu di *madrasah* sejak awal perkembangannya telah mengalami kegagalan. Sebab, penekanan pada ilmu-ilmu agama (al-'ulum al-dmiyyah) terutama pada bidang fikih, tafsir, dan hadits lebih dominan. Sehingga ilmu-ilmu non-agama khususnya ilmu-ilmu alam dan eksakta, tetap berada dalam posisi marginal.<sup>24</sup> Berbeda dengan *madrasah* di Indonesia yang sejak awal pertumbuhannya telah menjatuhkan pilihan pada (a) *madrasah* yang didirikan sebagai lembaga pendidikan yang semata-mata untuk mendalami agama (*li tafaqquh fiddin*), yang biasa disebut *madrasah* diniyah salafiyah; dan (b) *madrasah* yang didirikan tidak hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Tapi juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan

---

<sup>21</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, cet I, 1982), 160.

<sup>22</sup> Menurut Azyumardi Azra, *madrasah* sebagai lembaga pendidikan tinggi ini tidak bisa disamakan artinya dengan universitas dalam arti lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan penyelidikan bebas berdasarkan nalar. Dalam tradisi pendidikan Islam, lembaga pendidikan tinggi lebih dikenal dengan nama aljami'ah, yang secara historis dan kelembagaan berkaitan dengan masjid jami'—masjid besar tempat berkumpul jama'ah untuk menunaikan shalat Jum'at. Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), viii.

<sup>23</sup> Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia* (Surabaya: Risalah Gusti: 1996),.

<sup>24</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam..*, ix.

pemerintah Hindia Belanda; seperti *madrasah* Adabiyah di Sumatera Barat, dan *madrasah* yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan PUI di Majalengka.<sup>25</sup>

Dari keterangan di atas menarik untuk dicatat bahwa salah satu karakteristik *madrasah* yang cukup penting di Indonesia pada awal pertumbuhannya tidak ada konflik atau upaya mempertentangkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Konflik (lebih tepat disebut perselisihan pendapat), biasanya terjadi antara satu organisasi keagamaan dengan organisasi keagamaan lain yang memiliki faham keagamaan yang berbeda, dan mereka sama-sama mendirikan *madrasah*. Misalnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Tarbiyah Islamiyah, yang memiliki *madrasah*nya sendiri-sendiri untuk mensosialisasikan dan mengembangkan faham keagamaan masing-masing.

*Madrasah* di Indonesia secara historis memiliki karakter yang sangat merakyat, berbeda dengan *madrasah* pada masa klasik Islam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi *madrasah* pada masa klasik Islam terlahir sebagai gejala urban atau kota. *Madrasah pertama* kali didirikan oleh Dinasti Samaniyah (204-395 H/819-1005 M) di Naisapur kota yang kemudian dikenal sebagai daerah kelahiran *madrasah*<sup>26</sup>. Daerah Naisapur mencakup sebagian Iran, dan sebagian Afghanistan serta bekas Uni-Sovyet antara laut Kaspia dan laut Aral. Dengan inisiatif yang datang dari penguasa ketika itu, maka praktis *madrasah* tidak kesulitan menyerap hampir segenap unsur dan fasilitas modern, seperti bangunan yang permanen, kurikulum yang tertata rapi, pergantian jenjang pendidikan, dan tentu saja anggaran atau dana yang dikurirkan oleh pemerintah.

Hal ini berbeda dengan *madrasah* di Indonesia. Kebanyakan *madrasah* di Indonesia pada mulanya berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan pembaharuan pendidikan. Setelah mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Dana pembangunan dan pendidikannya pun berasal dari swadaya masyarakat. Karena inisiatif dan dananya didukung oleh masyarakat, maka

---

<sup>25</sup> H.A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1998), 116.

<sup>26</sup> Adam Mez, *The Renaissance of Islam*, Ted S. Khuda Buksh dan DS Margoliuth, (NY: AMS Press 1975), 179; Buillet, *The Patrician of Nisyapur*, (Cambridge: Mass. Harvard Univ. Press, 1972), 249-255.

masyarakat diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-anak mereka ke *madrasah* dengan biaya ringan.<sup>27</sup>

Sebagai lembaga pendidikan swadaya, *madrasah* menampung aspirasi sosialbudaya-agama masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya *madrasah* di pedesaan itu menjadi petunjuk bahwa masyarakat Indonesia ternyata memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pendidikan putra-putri mereka. Dari sudut pandang lain, hal itu juga berarti ikut meringankan beban pemerintah di bidang pendidikan. Dalam hal ini patut dicatat bahwa dari 36.000 jumlah *madrasah* yang ada (yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum), 96 persen di antaranya dikelola oleh masyarakat secara swadaya, atau *madrasah* swasta. Sementara itu *madrasah* yang mengkhususkan diri pada mata pelajaran agama, yaitu *madrasah* diniyah yang dikelola masyarakat, jumlahnya telah mencapai 22.000.<sup>28</sup>

Kini *madrasah* dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah Sistem Pendidikan Nasional dan berada di bawah pembinaan Departemen Agama. Lembaga pendidikan *madrasah* ini telah berkembang sehingga menjadi bagian dari budaya Indonesia, karena ia tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurun waktu cukup panjang yang dilaluinya, yakni kurang lebih satu abad, membuktikan bahwa lembaga pendidikan *madrasah* telah mampu bertahan dengan karakternya sendiri, yakni sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak anak didik. Karakter itulah yang membedakan *madrasah* dengan sekolah umum. Sehingga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 1989, *madrasah* didefinisikan sebagai "sekolah umum dengan ciri khas Islam" sebuah pengakuan atau sebutan yang cukup simpatik.

### **Tradisi dan Tuntutan Perubahan Madrasah**

Pada awal pertumbuhannya, madrasah berperan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu murni, sebagai perpanjangan dari madrasah diniyah yang telah ada sejak abad pertama sejarah Islam di timur tengah. Sementara di pihak lain, sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu umum telah ada sebelum adanya madrasah. Dengan demikian, awal pembaharuan Islam di nusantara terdapat dualitas model pendidikan; yakni

---

<sup>27</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa ...*, 163.

<sup>28</sup> H.A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam...*, 119.

pendidikan Islam dan pendidikan umum.<sup>29</sup> Kondisi ini selanjutnya berkembang menjadi praktik pendidikan dan pengembangan ilmu yang bernuansa dikotomik, sekolah agama yang berkolaborasi dengan keilmuan umum.

Namun iklim dikotomik ini secara perlahan tereduksi dan bahkan hilang sama sekali, terutama ketika ditetapkan undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah nomor 28 dan 29 tahun 1990 tentang pendidikan dasar dan menengah, serta diberlakukannya kurikulum 1994, dimana status madrasah sebagai madrasah diniyah berubah menjadi sekolah berciri khas Islam. Dengan perkataan lain, kedudukan madrasah sudah berbanding lurus dengan sekolah-sekolah umum<sup>30</sup>

Reposisi madrasah secara konstitusi, agaknya menjadi spirit utama dalam gerakan kolaborasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memberikan legitimasi teologis perubahan kurikulum madrasah yang integratif, sehingga kemudian muncul istilah madrasah terpadu.

Perkembangan ini membawa implikasi yang cukup mendasar bagi eksistensi madrasah yang semula dipandang sebagai institusi keagamaan namun, kemudian mengalami pengkayaan peran dan fungsi. Oleh karena itu, madrasah kemudian mendapat beban yang cukup berat, yaitu kewajiban untuk memberikan materi-materi dari dua perspektif sekaligus. Dan dari sinilah dilema dan bibit permasalahan mulai muncul<sup>31</sup>

Menurut Mulkhan dalam bukunya 'Nalar Spiritual Pendidikan', sejak perubahan situasi ini madrasah terus menghadapi pilihan yang sulit, yaitu di antara kebutuhan ukhrowi dan kebutuhan duniawi. Di satu sisi, madrasah dituntut bisa berfungsi meningkatkan pemahaman ilmu-ilmu agama dan kemampuan mengamalkan ajaran Islam. Sementara di sisi lain, lembaga ini dituntut berfungsi menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang tidak seluruhnya bisa dipecahkan dengan ilmu agama.<sup>32</sup>

Selain posisi madrasah yang berada antara dua kutub tersebut, posisi eksternal masih belum banyak menunjang dalam pembinaan madrasah

---

<sup>29</sup> Khozin, *Jejak-jejak pendidikan islam di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2006), 129.

<sup>30</sup> Azyumardi Azra. *Paradigma baru pendidikan nasional, rekonstruksi dan demokratisasi* (Jakarta: Kompas media Nusantara, 2002), 71.

<sup>31</sup> Khozin. *Jejak jejak pendidikan islam di Indonesia..*, 129.

<sup>32</sup> Ibid., 130.

secara optimal. Kondisi tersebut antara lain tidak memadainya dana yang diperlukan, kurangnya tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi persyaratan, kurangnya tenaga administrasi dan perencanaan pendidikan yang memiliki kemampuan serta kendala-kendala lain.

Dalam kondisi yang demikian para pemegang kebijaksanaan, perencana dan pengelola madrasah dituntut untuk mampu memiliki strategi pengelolaan madrasah yang tepat dan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang secara formal telah diberlakukan tanggal 1 januari 2001<sup>33</sup>

Munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, sebagai implikasi dari pemberlakuan undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, sebenarnya merupakan angin segar bagi kehidupan madrasah, karena kebijakan tersebut berarti mengembalikan madrasah kepada habitatnya. Pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah, dan menyeluruh. Karena itu, departemen agama perlu membuat kebijakan yang jelas mengenai status madrasah dalam konteks otonomi daerah<sup>34</sup>.

Dengan demikian madrasah perlu dikembangkan untuk memenuhi tiga tuntutan dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu: (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup ke-islaman, (2) bagaimana memperkuat keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah, (3) bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan ipteks dan era globalisasi.<sup>35</sup>

Sedangkan arah pengembangan pendidikan di madrasah bertujuan untuk dapat "mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara."<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan pendidikan anak bangsa..*, 127

<sup>34</sup> Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 187.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 211

<sup>36</sup> DEPAG, *Desain..*, 18.

Madrasah, dalam konteks mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan zaman akibat globalisasi saat ini memiliki peran sangat penting. Keberhasilan madrasah dalam menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks akan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa.

Dalam kaitannya dengan era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan, madrasah juga harus mempersiapkan peserta didiknya untuk siap bersaing. Hal ini dimaksudkan agar lulusan madrasah tidak terpinggirkan oleh lulusan sekolah umum dalam kompetisi dan peran dalam gerakan pembangunan bangsa. Terbukanya peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum harus dimanfaatkan oleh madrasah sebaik mungkin dan harus meningkatkan kualitas Madrasah harus mendorong peserta didiknya untuk mau bekerja di bidang ekonomi, teknik, dan ilmu eksakta murni agar bidang tersebut tidak hanya dikuasai oleh lulusan nonmadrasah yang belum tentu memiliki mental keagamaan yang kuat.<sup>37</sup>

Oleh karena itu kepala madrasah mempunyai peranan yang tidak ringan dalam rangka untuk menghadapi era globalisasi ini. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan Islam seorang kepala madrasah harus mempunyai peran mengupayakan pembenahan lembaga pendidikan yang sekarang ini masih pada dataran lemah, agar mutu pendidikan Islam yang diharapkan masyarakat luas memuaskan setidaknya-tidaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Program lembaga pendidikan supaya lebih terarah kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keterampilan dengan meningkatkan kemampuan untuk menggunakan berbagai peralatan elektronik.
- b. Reorganisasi dan konsolidasi terhadap pengajaran, kurikulum, silabus dan fasilitas belajar mengajar dan materi pembelajaran
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar yang mengelola lembaga pendidikan bersikap lebih terbuka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan diperlukan manajemen bidang pendidikan supaya lebih profesional.

---

<sup>37</sup> Ma'arif Syamsul. *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu2007), 173.

- d. Menciptakan kondisi dan situasi lingkungan madrasah menjadi lebih “madrasah idaman” sehingga fisik dan penampilan madrasah merupakan fokus utama untuk meningkatkan mutu pendidikan
- e. Kerjasama antar lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan supaya lebih ditingkatkan dan diperjelas maknanya<sup>38</sup>.

Bisa dikatakan bahwasanya madrasah dituntut untuk lebih meningkatkan pola penyelenggaraanya dalam menghadapi tuntutan zaman dengan tetap mengedepankan nilai-nilai islami dalam proses pembelajarannya sebagai karakteristik madrasah tersebut. Oleh karenanya untuk merealisasikan tuntutan tersebut perlu dukungan dan kerjasama semua komponen pendidikan yang ada di madrasah yang mencakup kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan lain sebagainya.

### Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: Lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, setidaknya karena beberapa alasan diantaranya: a) sebagai manifestasi pembaruan sistem pendidikan Islam, b) penyempurnaan sistem pesantren, c) keinginan sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan barat, dan d) sebagai sintesa sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat.

Karakteristik madrasah bukan hanya sekedar menyajikan mata pelajaran agama Islam di dalam lembaga madrasah tetapi yang lebih penting ialah perwujudan dari nilai-nilai keislaman di dalam totalitas kehidupan madrasah. Suasana lembaga madrasah yang melahirkan ciri khas tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) Perwujudan nilai-nilai keislaman di dalam keseluruhan kehidupan lembaga madrasah; (2) Kedidupan moral yang beraktualisasi, dan (3) Manajemen yang profesional, terbuka, dan berperan aktif dalam masyarakat.

Dalam memenuhi tuntutan zaman madrasah terus menghadapi pilihan yang sulit, yaitu di antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan duniawi. Di satu sisi, madrasah dituntut bisa berfungsi meningkatkan pemahaman ilmu-ilmu agama dan kemampuan mengamalkan ajaran Islam. Sementara di sisi lain, lembaga ini dituntut berfungsi menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak seluruhnya bisa dipecahkan dengan ilmu agama.

---

<sup>38</sup> DEPAG, *Rekonstruksi sejarah pendidikan islam di Indonesia* (Jakarta: direktorat jenderal kelembagaan agama Islam, 2005), 177-178

Dan pada masa otonomi daerah ini, madrasah perlu dikembangkan untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu: (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman, (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah, (3) bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan ipteks dan era globalisasi

Disamping itu pada masa globalisasi ini, madrasah dalam konteks mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan zaman, memiliki peran yang amat penting. Keberhasilan madrasah dalam menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks akan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi pemimpin umat pemimpin bangsa yang ikut menentukan arah perkembangan bangsa ini.

#### **Daftar Rujukan**

Adam Mez, *The Renaissance of Islam*, Ted S. Khuda Buksh dan DS Margoliuth, NY: AMS Press, 1975.

Asrohah Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

Azra, Azyumardi, *"Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan"*, Kata Pengantar untuk buku Nurcholish Madjid, Jakarta: Paramadina, 1997.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.

Azra, Azyumardi, *Paradigma baru pendidikan nasional, rekonstruksi dan demokratisasi*, Jakarta: Kompas media Nusantara, 2002.

DEPAG, *Desain Pengembangan Madrasah*, Jakarta: Direktorat jenderal kelembagaan Agama Islam, 2005.

DEPAG, *Rekonstruksi sejarah pendidikan islam di Indonesia*, Jakarta: direktorat Jenderal kelembagaan agama Islam, 2005.

Khozin, et.al. *Manajemen Pemberdayaan Madrasah*. Malang: UMM press, 2006.

Khozin, *Jejak-jejak pendidikan islam di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2006.

Ma'arif, Syamsul, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2007.



- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Malik, A. Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: LP3NI, 1998.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran pendidikan islam, kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalnya*, Bandung: Trigenda karya, 1993.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT rajaGrafindo Persada, 2010.
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam Edisi Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rachman, Abdul Shaleh, *Madrasah dan pendidikan anak bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparlan, Parsudi, *Pengetahuan Budaya, Ilmuilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*, Jakarta: Balitbang Depag RI, 1982.
- Steenbrink ,Karel A, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Steenbrink, Karel A, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Tilaar, *Pradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.